BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, minat masyarakat untuk menyimpan dana di bank tergolong rendah. Rendahnya perputaran dana masyarakat melalui perbankan berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini di buktikan oleh hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018 lalu, jumlah orang miskin mencapai 25,95 juta atau 9,82% dari total penduduk Indonesia (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>). Pada umumnya semua Negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia mempunyai program pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini peranan perbankan menjadi sangat vital layaknya sebuah jantung dalam manusia. Keduanya saling mempengaruhi dalam arti perbankan menjadi salah satu sumber pembiayaan yang akan mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi, sehingga Bank yang sehat akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu bangsa. Sebaliknya, kegiatan ekonomi yang tidak sehat, lesu atau rapuh juga akan sangat mempengaruhi tingkat kesehatan dunia perbankan.

Bank sangat penting dan berperan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu bangsa karena bank tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat, pelaksana dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman, praktis, dan ekonomis. Peranan lembaga perbankan yang sangat strategis ini terus ditata dan diperbaiki dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan). Undang-undang ini memberikan landasan yuridis yang lebih luas dan jelas serta mempertegas jangkauan pelayanan bank terhadap segala lapisan masyarakat.

Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*). Serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar pembayaran. Falsafah yang mendasari kegiatan usaha adalah kepercayaan masyarakat. Hal ini tampak dari kegiatan pokok bank yang menerima dari simpanan masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan serta deposito berjangka dan memberikan kredit pada pihak yang memerlukan dana. Dalam penerimaan simpanan masyarakat, bank hanya memberikan pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa bank telah menerima simpanan dalam jumlah dan untuk jangka waktu tertentu ((Ikatan Akuntan Indonesia, 2016: 31).

Kepercayaan masyarakat akan relatif bertambah jika bank dapat dipandang sehat baik dari segi permodalan, *assets*, manajemen, likuiditas, solvabilitas, rentabilitas/profitabilitas maupun dari aspek lainnya. Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Aturan kesehatan ini mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank sebagai penghimpun dana sampai penyaluran dana yang telah dipercayakan atau dihimpun kepada pihak yang memerlukan dana. Dalam hal ini, penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit ini mencapai 70%-80% dari volume usaha bank serta sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga. (Siamat, 2005: 165).

Besarnya kredit yang diberikan kepada nasabah, bank mempunyai risiko pengembalian piutang yang macet yaitu yang disebut dengan risiko kredit (*default risk*). Risiko kredit merupakan suatu risiko kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan pinjaman

yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. (Shaikh et al., 2017: 132).

Bagi kebanyakan bank, porsi kerugian yang ditimbulkan oleh risiko kredit ini merupakan salah satu unsur risiko kerugian yang terbesar, karena pendapatan yang diterima oleh pihak bank dalam kegiatan *lending* relatif kecil. Dengan demikian risiko kredit tersebut merupakan unsur yang paling memiliki potensi tercepat dalam menggerogoti modal bank. Pada hakikatnya perusahaan (bank) baik yang menjadi milik pemerintah maupun milik swasta bertujuan untuk memperoleh laba yang wajar dan berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya dengan cara menggunakan segala kemampuan serta daya yang telah tersedia yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup anggota/karyawan perusahaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank, karena dari penyaluran kredit tersebut pihak bank akan memperoleh keuntungan dari bunga yang dibebankan kepada kreditur. Akan tetapi dalam prakteknya bank tidak terlepas dari kredit bermasalah, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari pihak kreditur untuk melunasi kewajibannya. Oleh karena itu, dalam menjalankan usahanya bank harus mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kredit bermasalah yaitu dengan menjaga kualitas aktiva dan melakukan restrukturisasi kredit bermasalah. Dengan besarnya kredit yang diberikan kepada nasabah, bank mempunyai risiko pengembalian piutang yang macet, hal tersebut dapat meningkatkan *Non Performing Loan* (NPL) maka akibatnya bank juga harus menyediakan cadangan penghapusan piutang yang cukup besar, sehingga kemampuan memberi kredit menjadi sangat terbatas dan kemungkinan kepercayaan masyarakat akan berkurang. Dalam hal ini perlu adanya upaya pembenahan di sisi aktiva khususnya aktiva produktif berupa kredit, agar pihak debitur dapat kembali memenuhi kewajibannya kepada bank yang pada gilirannya

dapat memperbaiki kualitas pemberian kredit. Semakin besar jumlah kredit yang macet maka semakin kecil laba operasional yang diperoleh pihak perbankan.

Krisis perekonomian global bagi Indonesia telah mengakibatkan menurunnya ekspor, dan lebih lanjut berdampak pada menjadi lesunya kegiatan di sektor riil. Kelesuan di sektor riil akan berdampak pada kemungkinan menurunnya kinerja keuangan para nasabah pengguna pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Risiko yang dihadapi perbankan dari kondisi seperti tersebut diantaranya adalah, potensi meningkatnya kredit/pembiayaan menjadi tidak atau kurang produktif, yang biasa disebut sebagai *Non Performing Loan* (NPL). Peningkatan NPL setidaknya mempunyai dua sisi yang kurang menguntungkan, yaitu berkurangnya pendapatan secara efektif dari pembiayaan, dan meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memupuk cadangan kemungkinan kerugian yang disebut PPAP. Tekanan-tekanan yang timbul dari gejolak makro telah mengakibatkan terjadinya pergeseran secara tajam berbagai keadaan dari yang semula diasumsikan, diantaranya tingkat inflasi, harga minyak bumi dan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang luar negeri. tingkat inflasi pada bulan Bulan Desember 2019 meningkat sebesar 2,48% sedangkan nilai tukar ruapiah terhadap dollar Amerika Serikat sebesar Rp. 13.952 per dollar Amerika Serikat sehingga Bank Indonesia menaikkan BI *rate*, menjadi sebesar 5% pada Desember 2019 (m.bisnis.com/amp/read/20191227/93/1184823/nilai-tukar-rupiah-terhadap-dolar-as).

Sementara itu, dalam upaya menertibkan pengelolaan dana-dana milik berbagai Departemen, Pemerintah telah melakukan penarikan sementara dana-dana yang ditempatkan pada perbankan. Kejadian sebagaimana diutarakan di atas berdampak pada ketatnya ketersediaan likuiditas perbankan dan lebih jauh meningkatkan biaya dana yang harus dipikul. Kemungkinan terjadinya kondisi yang kurang menguntungkan tahun 2019 disadari oleh manajemen dengan melakukan langkah antisipatif yang diperlukan, yang pada dasarnya merupakan langkah lanjutan dari kebijakan yang sudah dirintis tahun sebelumnya, hal yang

menjadi pertimbangan salahsatunya posisi NPL nasional akhir tahun 2019 2,53% atau meningkat sebesar 0,16% di banding akhir tahun 2018 yaitu sebesar 2,37%.

Sejak akhir tahun 2017 hantaman krisis keuangan tampaknya mulai menggoyahkan fondasi perbankan. Sementara itu, OJK mencatat, sampai dengan Oktober 2019 penyaluran kredit industri perbankan hanya tumbuh 6,53% (yoy). Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan dengan kredit per September 2019 yang meningkat 7,89% (yoy). perlambatan kredit tersebut karena permintaan yang juga melambat. “Pertumbuhan kredit per Oktober itu masih ditopang oleh kredit investasi yang tetap tumbuh dua digit di level 11,2% (yoy). Sedangkan kredit sektoral yang turun itu adalah tambang dan konstruksi. Pertambangan dan penggalian kalau dibandingkan tahun sebelumnya turun Rp 5 triliun atau minus 4% (yoy) per Oktober”. OJK mengungkapkan supply chain sektor tersebut masih belum bangkit, dari harga yang naik dapat berpengaruh jika transportasi terganggu tidak bisa meningkatkan ekspor atau produksinya. Selain itu, sektor perantara keuangan mengalami penurunan penyaluran kredit dari Rp 24 triliun pada tahun lalu menjadi hanya Rp 22 triliun pada Oktober 2019. “Sektor yang tertekan masih tambang, kalau yang lain meningkat,” ungkap dia. Perlambatan kredit tersebut juga sejalan dengan kenaikan rasio kredit bermasalah (non performing loan/ NPL) industri perbankan pada September 2019 di posisi 2,66%, naik menjadi 2,73% per Oktober 2019. Kenaikan NPL tersebut merupakan dampak dari industry pengolahan yang mengalami kredit macet di perbankan. Salah satunya disebabkan oleh Duniatex Grup yang menyumbang NPL di perbankan. “Di industri pengolahan itu kena dampak dari Duniatex, bukan hanya tekstil di hilirnya, tapi di hulunya juga kena”. Industri pengolahan mengalami kenaikan NPL dari posisi 2,52% per Desember 2018 menjadi 4,14% per Oktober 2019. Hal tersebut karena total utang Duniatex sebesar Rp 22 triliun kepada perbankan dan nonbank dan diperkirakan masih ada kemungkinan bertambah karena kreditur masih mendaftarkan tagihannya di Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (PKPU). Selain industri pengolahan, sektor perdagangan

juga mengalami kenaikan di sisi NPL, tercatat NPL Desember 2018 berada di posisi 3,57%, sampai Oktober 2019 naik ke level 3,92%.

Kegiatan bank berupa penyaluran kredit pada akhirnya diharapkan akan memberikan kontribusi yang positif bagi pendapatan perbankan. Penyaluran dana melalui pemberian kredit merupakan usaha terpenting karena dapat mendorong kelancaran perdagangan, perusahaan, jasa, dan konsumsi. Pendapatan operasional lain yang terdiri dari pendapatan imbal-jasa berupa provisi dan komisi non kredit, laba dari transaksi valuta asing, pendapatan administrasi dan pendapatan operasional lain. Sedangkan beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) di level 80,50% atau naik dibandingkan September tahun lalu 79,13%. Data OJK juga menunjukkan, hingga September 2019 kelompok bank asing mencatatkan pertumbuhan laba tertinggi sebesar 52,41% dari Rp 5,80 triliun pada September 2018 menjadi Rp 8,84 triliun. Kelompok bank umum swasta nasional (BUSN) nondevisa mencetak laba Rp 1,50 triliun atau tumbuh 14,50% dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 1,31 triliun. Peringkat ketiga untuk pertumbuhan laba bersih diraih kelompok BUSN devisa sebesar 9,63% dari Rp 36,97 triliun menjadi Rp 40,53 triliun. Kelompok bank persero mencatatkan laba bersih Rp 56,10 triliun atau tumbuh 4,53% dibandingkan September tahun lalu Rp 53,67 triliun. Sementara itu, kelompok bank pembangunan daerah (BPD) mencatatkan penurunan pertumbuhan laba bersih 10,53% dari Rp 10,07 triliun menjadi Rp 9,01 triliun. Demikian juga kelompok bank campuran membukukan penurunan laba 34,02% menjadi Rp 1,61 triliun dibandingkan September 2018 sebesar Rp 2,44 triliun (<https://investor.id/finance/september-perbankan-cetak-laba-rp-11759-triliun>)

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ketika tingkat kredit bermasalah (NPL) meningkat akan mengurangi laba operasional yang diperoleh oleh pihak bank, begitu juga sebaliknya ketika kredit bermasalah (NPL) kecil maka laba operasional akan besar. Oleh

karena itu pihak bank harus lebih jeli dan teliti dalam memberikan kredit kepada pihak debitur juga dalam memberikan bunga kredit jangan terlalu membebankan pihak debitur.

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh *Non Performing Loan* Dan Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Rentabilitas”**. (Sensus Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana *Non performing Loan* (NPL), Kualitas Aktiva Produktif, dan Rentabilitas Pada Emiten Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) dan Kualitas Aktiva Produktif baik secara parsial maupun simultan Terhadap *Rentabilitas* Pada Emiten Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *Non performing Loan* (NPL), Kualitas Aktiva Produktif dan Rentabilitas Pada Emiten Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) dan Kualitas Aktiva Produktif baik secara parsial maupun simultan Terhadap *Rentabilitas* Pada Emiten Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak. Adapun kegunaan yang diharapkan antara lain:

- 1) Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan, wawasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan dunia perbankan, baik teori maupun prakteknya.

2) Bagi pihak Bank

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dan menjadi masukan yang positif bagi pihak Bank agar mengetahui pengaruh Bunga Kredit terhadap *Non performing Loan* (NPL) serta dampaknya terhadap Laba Operasional.

3) Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan dan perbandingan bagi penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh Bunga Kredit terhadap *Non performing Loan* (NPL) serta dampaknya terhadap Laba Operasional oleh para penulis lain.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1`Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara sensus pada Perusahaan Perbankan Konvensional yang ada di Bursa Efek Indonesia dengan memperoleh data sebagai penunjang penelitian melalui akses internet dengan situs www.idx.co.id dan www.bi.go.id.

1.5.2`Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, terhitung mulai Bulan September 2020 sampai Januari 2021. Untuk lebih jelas maka waktu penelitian disajikan dalam Lampiran 1 (terlampir).